



KOTAK TEMUAN: MEDIA AKTUALISASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI SISWA DI SEKOLAH DASAR

Erry Trisna Nurhayana
SD Negeri 14 Pemecutan

ABSTRACT

Anticorruption education as a preventive effort to generate future generations of anticorruption. This research uses research and development methods with the aim of describing the stages of anticorruption education actualization activities with the Box of Findings, the values revealed in the actualization and the students' responses to the actualization of anticorruption education in schools. Data were collected by participant observation techniques, in-depth interviews, documentation, and questionnaires. The sample of data source is 47 students of SD Negeri 14 Pemecutan determined by purposive sampling. The results of this study indicate that: 1) preliminary study stage, 2) development study stage, 3) evaluation / reflection stage; 2) There are 3 values of anticorruption shown through student behavior that is value of honesty, caring value, and value of discipline; 3) Positive category is shown by the students towards the implementation of actualization activities of anticorruption education. Based on these findings it is suggested that anticorruption education is not enough through socialization alone, but must be realized with real behaviors.

Keywords: actualization, value, anticorruption

PENDAHULUAN

Kasus korupsi merupakan permasalahan serius di negara Indonesia. Korupsi telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena terjadi secara sistemik, terorganisasi di semua sektor kehidupan. Pada tahun 2007, pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencanangkan program kerja yaitu melakukan upaya kuratif yang memang memberikan hasil seketika. Walaupun upaya kuratif memberi efek secara langsung, namun korupsi telah menjangkau secara luas maka dipandang perlu melakukan upaya preventif. Upaya preventif ini haruslah melibatkan semua unsur mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga pendidikan tinggi.

Upaya preventif yang bertujuan menumbuhkan generasi bersih dan antikorupsi ini telah dilakukan melalui kerjasama KPK, Kementerian Pendidikan

Nasional, dan sekolah. Tercantum pada pasal 13 UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa KPK berhak menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi bekerja sama dengan Depdiknas pada setiap jenjang pendidikan melalui sosialisasi, komunikasi, dan pendidikan. Dengan demikian generasi penerus bangsa ini diharapkan menjadi generasi antikorupsi, dan atas dasar inilah pendidikan antikorupsi terus digalakkan pada seluruh instansi pendidikan (Suciptaningsih, 2014).

Namun, harapan pemerintah ini cenderung tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Di tengah gencarnya kampanye pendidikan antikorupsi, justru korupsi yang mengarah pada tindak pidana dilakukan oleh kaum intelektual. Adanya keterlibatan tokoh intelektual, pejabat publik, bupati, dan penyelenggara pemerintah dalam kasus korupsi di Indonesia, maka tidaklah



mengherankan jika Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada ranking 107 dari 175 negara yang di survei *Transparency International* tahun 2014. Indonesia tentu masih sangat kalah dari Singapura yang menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 sebagai negara paling bersih dari korupsi (*Liputan6.com*, 2014). Sungguh prestasi yang memprihatinkan bagi negara kita.

Memasuki tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu menempatkan kelompok usia produktif dalam skala besar. Sudah sepatutnya kondisi ini menjadi hal yang menguntungkan untuk mencapai kesejahteraan, kestabilan ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Akankah itu terwujudkan? Sumber daya manusia yang berkualitas dan antikorupsi adalah hal yang mutlak harus disiapkan. Mengingat saat ini spektrum perilaku korupsi sangat luas dan tidak bisa dihentikan secara instan, maka diperlukan upaya menciptakan tunas-tunas integritas yakni melalui pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan upaya preventif untuk tidak melakukan korupsi yang bertujuan untuk mencegah terbentuknya koruptor. Di dunia pendidikan, pendidikan antikorupsi ini tidak diberikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri, melainkan dengan cara mengintegrasikan melalui beberapa mata pelajaran untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi oleh KPK telah dilakukan melalui pembuatan komik dan modul bagi siswa maupun bagi guru dari tingkat sekolah dasar hingga Perguruan Tinggi. Efektifkah pendidikan antikorupsi terbatas pada penggunaan komik dan modul? Suciptaningsih (2014) menyatakan bahwa komik dan modul tersebut belum digunakan secara maksimal untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi karena hanya mengarah pada aspek kognitif saja. Pada hakikatnya, pendidikan antikorupsi ini harus diaktualisasikan secara nyata dalam

kehidupan sekolah. Siswa tidak hanya belajar secara kognitif mengetahui nilai-nilai antikorupsi, melainkan secara afektif mampu bersikap dan psikomotoriknya mampu mengaktualisasikan perbuatan yang mencerminkan perilaku antikorupsi. Didukung pula oleh Subagia, dkk (2006) bahwa proses belajar merupakan kegiatan menyeluruh (fisik dan mental) yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Ini berarti bahwa belajar melibatkan kemampuan dasar manusia, yaitu kemampuan bergerak, berbicara, dan kemampuan berpikir.

Jenjang pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar merupakan tempat pembentukan moral siswa karena di tempat ini secara sengaja dikondisikan untuk kegiatan belajar. Pendidikan antikorupsi dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang tujuannya untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk dapat memberikan keputusan baik-buruk, membedakan perilaku jujur-curang, dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru selaku ujung tombak pendidikan di sekolah memiliki peranan sangat penting untuk memberikan pengalaman langsung dan pembiasaan kepada siswa tentang kegiatan yang mengandung nilai antikorupsi. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada pendidikan antikorupsi (LAN, 2014) yaitu: 1) jujur, 2) peduli, 3) mandiri, 4) disiplin, 5) tanggungjawab, 6) kerjakeras, 7) sederhana, 8) berani, dan 9) adil. Jika guru sudah mengetahui nilai-nilai yang terkandung pada pendidikan antikorupsi maka penanaman nilai dapat dilakukan dengan membiasakan siswa untuk: 1) bertindak jujur dengan tidak menyontek, 2) jujur untuk mengakui kesalahan, 3) mengembalikan barang yang bukan menjadi hak miliknya, dan berbagai kegiatan positif lainnya.

Diyakini bahwa guru telah berusaha menyampaikan dan memberikan informasi tentang perilaku antikorupsi terhadap siswa.

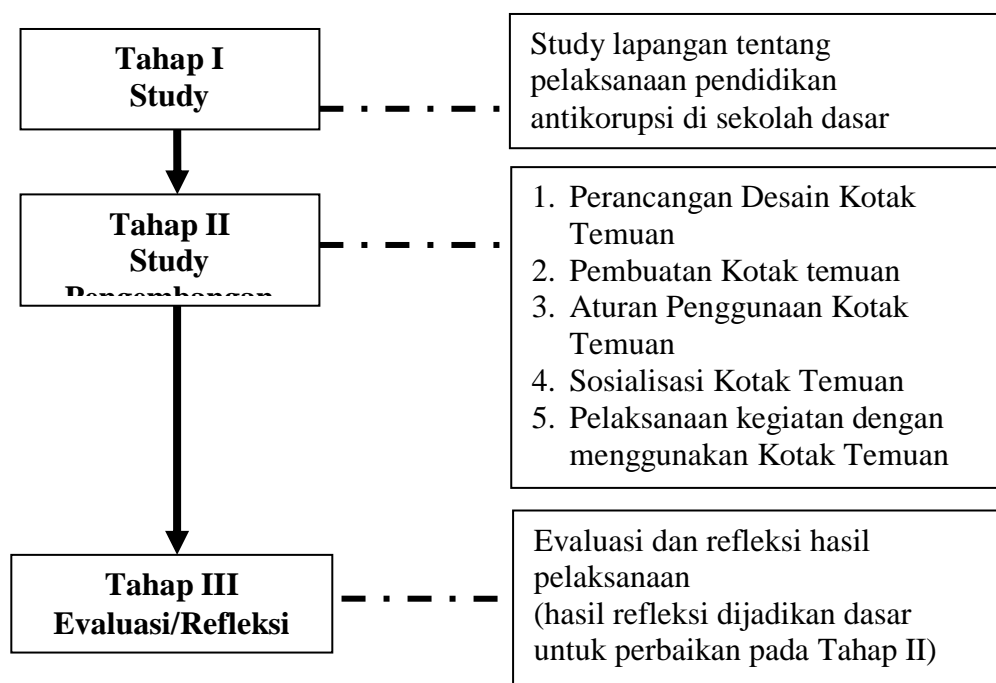


Namun, pendidikan antikorupsi haruslah diwujudkan dalam perilaku nyata dalam bentuk media pendidikan. Salah satu bentuk media untuk membiasakan perilaku antikorupsi adalah menyediakan pos pengembalian barang dalam bentuk Kotak Temuan. Kotak Temuan yang dimaksud adalah kotak penampungan barang-barang yang ditemukan warga sekolah di lingkungan sekolah. Dalam konteks inilah, penelitian ini bermaksud memberikan gambaran

aktualisasi pendidikan antikorupsi di sekolah dasar dengan menggunakan media Kotak Temuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (*research and development*). Adapun rancangan pelaksanaan penelitian ini dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut.



Gambar 1 Tahap Penelitian dan Pengembangan Kotak Temuan (diadaptasi dari Sugiyono, 2010)

Pada penelitian menggunakan metode deskriptif yang bertujuan memperoleh gambaran secara empirik tentang aktualisasi pendidikan antikorupsi, nilai-nilai yang muncul pada aktualisasi, serta tanggapan siswa terhadap aktualisasi nilai-nilai anti korupsi. Penelitian ini dilakukan mulai bulan April hingga September 2015. Tempat penelitian di SD Negeri 14 Pemecutan, Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diungkap dengan

menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, kuisisioner, dan studi dokumentasi serta gabungan sebagai bentuk triangulasi data. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (Sugiyono, 2010).

Instrumen penelitian disusun untuk memperoleh data yang akurat terhadap subjek penelitian. Untuk mengumpulkan data tentang gambaran pelaksanaan aktualisasi dan nilai-nilai yang muncul pada aktualisasi, peneliti menggunakan



teknik observasi partisipan, wawancara mendalam dengan siswa sebagai informan, dan studi dokumentasi. Sedangkan, penelitian bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa, maka perlu disusun instrumen penelitian berupa kuisisioner. Penyusunan instrumen dan banyak item disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik informan. Sebelum menyusun instrumen maka perlu menyiapkan kisi-kisi. Kisi-kisi meliputi nilai kejujuran, nilai kepedulian, dan kebermanfaatn Kotak Temuan.

Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel sumber data penelitian ini adalah siswa SD Negeri 14 Pemecutan sebanyak 47 orang. Analisis data dilakukan berdasarkan jenis data yang diperoleh selama di lapangan. Analisis difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan menggunakan kuisisioner yaitu mengetahui tanggapan siswa, peneliti menggunakan skala Guttman yaitu memberi 2 alternatif jawaban yaitu "YA" dan "TIDAK" (Sugiyono, 2010). Tanda silang (X) yang diberikan informan pada jawaban "YA" mendapatkan nilai 1, sedangkan tanda silang (X) pada jawaban "TIDAK" mendapatkan nilai 0. Guna mendapatkan nilai rata-rata jawaban tiap informan (individu), maka ditentukan dengan menghitung banyak centang pada jawaban "YA" kemudian dibandingkan dengan banyak item pernyataan.

Setelah memperoleh nilai rata-rata jawaban individu dilanjutkan dengan menghitung nilai rata-rata seluruh informan. Nilai rata-

rata seluruh informan dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai rata-rata tiap informan (individu), hasil yang diperoleh kemudian dibagi dengan banyak semua informan.

Pada tahap akhir, dilakukan analisis untuk menentukan kategori tanggapan tiap siswa terhadap aktualisasi pendidikan antikorupsi. Penentuan kategori dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata tiap informan dengan nilai rata-rata seluruh informan. Nilai rata-rata seluruh informan dijadikan sebagai nilai pembatas. Jika nilai rata-rata tiap informan lebih tinggi atau sama dengan nilai rata-rata seluruh informan maka tanggapan siswa dikategorikan "POSITIF". Sebaliknya, jika nilai rata-rata tiap informan kurang dari nilai rata-rata seluruh informan maka tanggapan siswa dikategorikan "NEGATIF". Kategori tanggapan siswa dapat disajikan sebagai berikut.

Jika skor $X \geq X_r =$ Positif

Jika skor $X < X_r =$ Negatif

Keterangan:

X = skor rata-rata individu informan

X_r = skor rata-rata seluruh informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tahapan kegiatan penelitian dan pengembangan Kotak Temuan di SD Negeri 14 Pemecutan sebagai bentuk aktualisasi pendidikan antikorupsi dilakukan meliputi 3 tahap kegiatan yaitu: 1) tahap study pendahuluan, 2) tahap study pengembangan, 3) tahap evaluasi/refleksi.



Pertama, pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar selama ini dilakukan dengan terbatas pada penggunaan komik dan modul yang disediakan oleh KPK. Penggunaan komik dan modul belum optimal untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi karena hanya mengarah pada aspek kognitif saja. Padahal, pendidikan antikorupsi ini harus diaktualisasikan secara nyata dalam kehidupan sekolah. Pendidikan Antikorupsi tidak cukup pada aspek pengetahuan, melainkan perlu diwujudkan dalam bentuk sikap, perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi di sekolah dasar belum diwujudkan dalam bentuk media yang mampu menumbuhkan pembiasaan perilaku antikorupsi.

Kedua, tahap study pengembangan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan

adalah melakukan konsultasi dengan dewan guru, kepala sekolah untuk menentukan desain, lokasi penempatan, dan membuat daftar barang hasil temuan, menentukan prosedur pengembalian barang kepada pemiliknya, serta bentuk *reward* kepada penemu benda yang hilang. Setelah disepakati, pos penemuan barang berbentuk kotak kaca yang diletakkan di depan ruang guru. Petugas harian adalah dewan guru sesuai jadwal piket yang telah ditetapkan sekolah. Kaca dipilih sebagai bahan dasar agar benda yang berada didalamnya tampak secara transparan. Bentuk *reward* yang diberikan adalah orang yang menemukan barang memiliki kesempatan untuk mengembalikan pada pemiliknya. Secara visual, bentuk kegiatan dapat disajikan pada Gambar 2.a dan 2.b berikut.



Gambar 2.a Konsultasi tentang desain produk

Sumber foto: Dokumen sekolah



Gambar 2.b Bentuk Kotak Temuan

Sumber foto: Dokumen sekolah



Setelah Kotak Temuan dibuat, maka dilakukan sosialisasi Kotak Temuan kepada warga sekolah, menjelaskan prosedur penyimpanan barang ke Kotak

Temuan dan pengambilan barang dari kotak temuan. Secara visual kegiatan ini disajikan pada Gambar 2.c, 2.d, dan 2.e berikut.



Gambar 2.c Sosialisasi Kotak Temuan

Sumber foto: Dokumen sekolah



Gambar 2.d Kegiatan mencatat barang yang ditemukan/dikembalikan

Sumber foto: Dokumen Sekolah



Gambar 2.e Hasil temuan yang dikembalikan pada pemiliknya

Sumber foto: Dokumen Sekolah

Ketiga, Tahap evaluasi/refleksi. Observasi dilakukan selama kegiatan berlangsung. Hasil observasi ini kemudian dijadikan bahan evaluasi

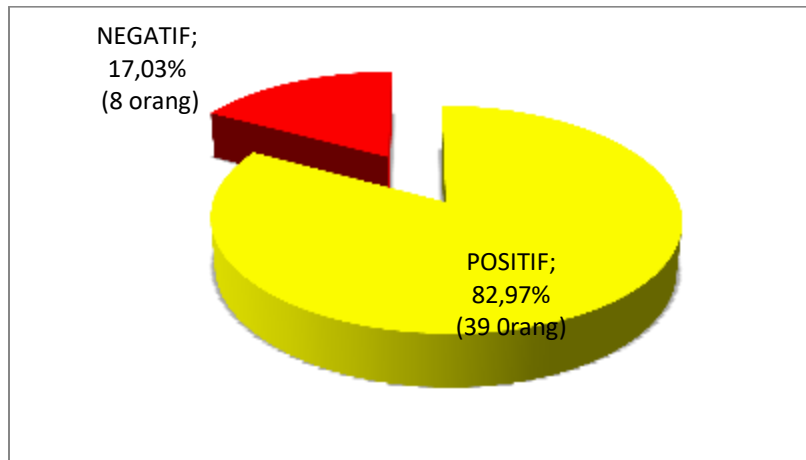
untuk memperbaiki kualitas aktualisasi pendidikan antikorupsi di sekolah. Evaluasi yang dilakukan berupa pengamatan pelaksanaan,



aktivitas siswa, dan pemilahan barang pada Kotak Temuan.

Kegiatan penanaman nilai antikorupsi bagi warga sekolah melalui aktualisasi Kotak Temuan

merupakan hal yang baru bagi siswa. Data kuisisioner tentang tanggapan siswa dapat disajikan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 3. Diagram Tanggapan Siswa

Mengacu pada Gambar 3 menunjukkan 82,97% (39 orang) informan berada pada kategori positif, sedangkan 17,03% (8 orang) informan berada pada kategori negatif. Secara umum menunjukkan bahwa aktualisasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan di SD Negeri 14 Pemecutan mendapatkan tanggapan positif dari siswa.

Pembahasan

Tugas utama guru adalah mendidik. Berbagai disiplin ilmu diberikan kepada siswa termasuk pendidikan moral. Sekolah adalah tempat yang cocok untuk menanamkan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi tidak semata-mata dapat diberikan melalui teori, melainkan harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa adalah objek belajar di sekolah. Belajar merupakan proses perubahan secara holistik. Belajar dapat dikatakan sebagai perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik.

Kotak Temuan memberi ruang bagi siswa untuk belajar mengenal perilaku antikorupsi. Aktualisasi pendidikan antikorupsi di SD Negeri 14 Pemecutan dilakukan dengan menyediakan Kotak Temuan. Pelaksanaan kegiatan meliputi tiga tahap kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Pada tahap study pendahuluan ditemukan bahwa perlu media untuk untuk mengaktualisasikan pendidikan anti korupsi. Selanjutnya, pada tahap study pengembangan disepakati bahwa media yang digunakan adalah Kotak Temuan Tahap ini adalah inti dari kegiatan aktualisasi. Sosialisasi keberadaan Kotak temuan serta fungsinya dilakukan secara langsung kepada seluruh siswa. Prosedur pencatatan dan pengembalian barang kepada pemiliknya juga disampaikan kepada seluruh siswa. Data pada daftar temuan menunjukkan bahwa banyak benda yang ditemukan dan dimasukkan pada Kotak Temuan



antara lain: uang, pensil, pita, pulpen, dan jam tangan. Mekanisme pengembalian barang diawali dengan melihat daftar catatan barang temuan, mencatat identitas diri pengambil, bagi seseorang yang mengaku kehilangan barang harus menyebutkan ciri-ciri, warna, atau bentuk barang yang dimaksud, serta perkiraan tempat barang itu hilang. Jawaban yang diberikan akan diklarifikasikan dengan barang yang ada dan konfirmasi kembali dengan penemu. Apabila terdapat kecocokan jawaban, maka barang tersebut kan dikembalikan pada pemiliknya. Pada Gambar 2.e, merupakan contoh prosedur pengembalian barang kepada pemiliknya. Sebagai bentuk *reward*, maka orang yang menemukan baranglah memiliki kesempatan untuk mengembalikan pada pemiliknya.

Hasil evaluasi/refleksi menunjukkan perlu dilakukan perbaikan terhadap aktualisasi pendidikan antikorupsi agar pelaksanaan dilakukan secara optimal oleh seluruh warga sekolah. Evaluasi terhadap karakteristik barang yang dapat ditaruh di Kotak Temuan menjadi catatan penting. Beberapa barang yang memang tidak layak pakai (pulpen yang kosong, penggaris patah, patahan pensil, pita rambut rusak) dimasukkan ke dalam Kotak Temuan. Barang yang tidak layak pakai ini tentu tidak diambil oleh pemiliknya, sehingga Kotak Temuan penuh dengan barang yang memang tidak layak digunakan lagi. Hasil evaluasi ini menyarankan agar sosialisasi kembali dilakukan terhadap seluruh siswa. Sosialisasi lebih ditekankan pada kriteria barang yang dapat dimasukkan ke dalam Kotak Temuan. Kejadian memasukkan barang tidak layak

pakai yang pernah terjadi, agar tidak terulang kembali.

Upaya preventif dengan penanaman nilai-nilai anti korupsi diperuntukkan kepada semua pihak, sehingga program anti korupsi dilakukan mulai dari tingkat sekolah sampai ke tingkat keluarga (Elvandari, 2008). Hasil pada penelitian ini menemukan setidaknya ada tiga nilai antikorupsi yang muncul. Nilai-nilai anti korupsi tersebut adalah kejujuran, kepedulian, dan disiplin. Kegiatan mengembalikan barang yang bukan menjadi hak milik adalah bagian dari aktualisasi nilai kejujuran pada pendidikan antikorupsi. Kepedulian siswa ditunjukkan dengan ikeikutsertaan siswa mencari barang temannya yang hilang. Nilai disiplin terwujud saat siswa menaati prosedur pencatatan barang temuan dan pengembalian barang kepada pemiliknya.

Tanpa kita sadari, perilaku korupsi sebenarnya terjadi jika ada unsur keserakahan, kebutuhan, dan peluang. Keserakahan yang dimaksud adalah keserakahan untuk memiliki walaupun tidak membutuhkan. Contoh, siswa yang menemukan pulpen tetapi tidak membutuhkan dan sengaja tidak mengembalikan ke Kotak Temuan termasuk unsur keserakahan. Sementara, kebutuhan didasari atas keperluan yang mendesak. Unsur peluang berdasarkan adanya kesempatan untuk memiliki barang yang bukan miliknya. Secara sederhana, perilaku-perilaku yang termasuk korupsi ini perlu dipahami siswa dan tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan itu, Hakim (2012) menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi harus meliputi tiga aspek



yaitu: 1) domain kognitif yang menekankan aspek untuk mengingat dan mereproduksi informasi tentang hakikat korupsi, 2) domain afektif yang menekankan aspek emosi, sikap, dan tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu, dan pembentukan karakter antikorupsi, dan 3) domain psikomotorik menekankan pada keterampilan berupa perilaku antikorupsi.

Berdasarkan Gambar 3 tentang tanggapan siswa terhadap aktualisasi pendidikan antikorupsi menunjukkan bahwa 82,97% (39 orang) informan berada pada kategori positif, sedangkan 17,03% (8 orang) informan berada pada kategori negatif. Secara umum menunjukkan bahwa aktualisasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan di SD Negeri 14 Pemecutan ditanggapi positif oleh siswa. Untuk informan yang berada pada kategori negatif, peneliti melakukan wawancara mendalam guna menggali informasi lebih lanjut. Hasil wawancara menemukan terdapat siswa kurang menunjukkan sikap empati terhadap teman yang kehilangan barang. Terungkap bahwa empati siswa muncul bergantung pada situasi diri dan siapa orang yang kehilangan barang. Jika yang kehilangan barang adalah teman dekat maka, empati tersebut akan muncul. Sebaliknya, jika yang kehilangan barang bukan teman baik/akrab maka muncul sikap acuh tak acuh yang berdampak pada sikap tidak peduli, serta tidak adanya niat untuk membantu mencari barang yang hilang. Kondisi ini menunjukkan bahwa empati/kepedulian sangat dipengaruhi oleh kapasitas pribadi. Kapasitas pribadi ini mempengaruhi

orang untuk peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar.

Kepedulian siswa dapat ditumbuhkembangkan melalui pembiasaan dan pengaruh lingkungan sekitar. Mengingat pendidikan formal dilaksanakan di sekolah, maka sebagai guru agar memperhatikan kemampuan peserta didik ketika memberi wawasan pengetahuan tindakan korupsi, menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi melalui pembelajaran dan memberi contoh perilaku antikorupsi. Perilaku-perilaku sederhana yang merupakan wujud antikorupsi hendaknya menjadi budaya di sekolah. Budaya memberi salam, budaya menghargai hak milik orang lain, budaya untuk mengakui kesalahan, budaya membantu orang lain adalah hal-hal sederhana namun bermakna di dalam kehidupan sosial. Gerakan antikorupsi melalui jalur pendidikan merupakan langkah awal yang ditempuh untuk mulai melakukan penanaman nilai ke arah yang lebih baik dari sejak usia muda dengan membangun karakter antikorupsi melalui pembentukan sikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerjakeras, sederhana, berani, dan adil (LAN, 2014).

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa telah mulai tumbuh nilai-nilai antikorupsi seperti nilai kejujuran, kepedulian, dan nilai disiplin. Tumbuhnya nilai-nilai pendidikan antikorupsi di sekolah dasar merupakan langkah sederhana hari ini yang diharapkan akan melahirkan generasi antikorupsi di masa mendatang.

PENUTUP



Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah, dapat ditemukan hal sebagai berikut.

1. Aktualisasi pendidikan antikorupsi di SD Negeri 14 Pemecutan melalui Kotak Temuan dilakukan meliputi 3 tahap kegiatan yaitu: 3 tahap kegiatan yaitu: 1) tahap study pendahuluan, 2) tahap study pengembangan, 3) tahap evaluasi/refleksi.
2. Selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi nilai antikorupsi terungkap setidaknya 3 nilai antikorupsi yang ditunjukkan melalui perilaku siswa. Ketiga nilai tersebut adalah nilai kejujuran, nilai kepedulian, dan nilai disiplin.
3. Tanggapan siswa SD Negeri 14 Pemecutan terhadap pelaksanaan kegiatan aktualisasi nilai antikorupsi menunjukkan kategori positif.

Bertolak dari temuan penelitian, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan antikorupsi tidak cukup melalui sosialisasi semata, melainkan harus diwujudkan melalui perilaku-perilaku nyata. Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai antikorupsi akan tumbuh seiring dengan terjadinya pembiasaan-pembiasaan perilaku antikorupsi.
2. Pemberantasan kasus korupsi dengan mewujudkan generasi antikorupsi melalui jalur pendidikan adalah upaya preventif pemerintah. Untuk itu, kepada instansi terkait agar melakukan sosialisasi yang intensif dan langkah nyata kepada penyelenggara pendidikan.

3. Ketika antikorupsi masuk pada jalur pendidikan, maka pengembangan model kurikulum yang sesuai hendaknya menjadi perhatian *stakeholder* pendidikan. Selain itu, pembentukan karakter pendidik dan tenaga kependidikan dengan jiwa antikorupsi penting dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di badan Diklat terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Elvandari, dkk. 2008. Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Keluarga (*Sosialisasi Program Anti Korupsi*) Tersedia pada Warta Pengabdian Andalas Volume XIV, Nomor 21 Desember 2008
- Hakim, Lukman. 2012. *Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi*. Tersedia pada Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 10 NO. 2-2012
- <http://news.liputan6.com/read/2144872/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2014-naik-7-peringkat> diakses pada 12 Juli 2015
- Lembaga Administrasi Negara. 2014. *Anti Korupsi* (Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III).
- Subagia, dkk.2006. *Potensi-Potensi Kearifan Lokal Masyarakat Bali Dalam Bidang Pendidikan* termuat pada Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri



Singaraja, No. 3 TH. XXXIX
Juli 2006

Suciptaningsih, O.A. 2014.
Pendidikan Anti Korupsi
Bagi Siswa Sekolah Dasar Di
Kecamatan Gunungpati.
Universitas PGRI Semarang

ADI WIDYA: Jurnal Pendidikan Dasar
Volume. 1, Nomor 1 April 2017
ISSN: 2527-5445
<http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/AW>

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan
R&D*. Bandung: Alfabeta

UU. No. 30 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi